

**Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan
Keuangan DiWebsite Pemda
(Studi Emperis Pada Pemerintah Daerah SeMalang Raya Periode 2013-2015)**

Oleh:

Hastini Yanti Susiyah,

Afifudin dan

M. Cholid Mawardi

Fakultas Ekonomi Universitas

Islam Malang

Malang Indonesia

E-mail: susiyah.ys@gmail.com/ No.tlp:

081231186840

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the influence of local government characteristics on the level of financial statement disclosure on the local government website (empirical study on local government entire of Malang). The data used in this study is secondary data obtained from the website of local government and regional statistics center. The sample used in this research is 6 LKPD Regency and City all of entire Malang on 2013-2015. The results of this study indicate that the size and wealth of local governments and Number of Population does not significantly influence LKPD Disclosure Rate on the website

Keywords : size, wealth, disclosure.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah (pemda) adalah satu organisasi sektor publik yang mengelola anggaran pemerintah dengan berbagai kebijakan dan program dengan harapan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di daerahnya, sebagai instansi dan organisasi sektor publik yang menggunakan dana dari masyarakat berupa pajak, maka pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan laporan secara akuntabilitas dan memenuhi harapan masyarakat. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang di perlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat di percaya. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang di lampiri dengan laporan keuangan pemda sesuai UU No. 17/2003 tentang laf 2 keuangan daerah.

Laporan keuangan daerah merupakan suatu asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal (Fitri, 2006). Menurut Na'im dan Rakhman (2000), pengungkapan dalam laporan keuangan dapat di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen pemda entitas pelaporan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang di pandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut, sedangkan pengungkapan wajib mengungkapkan laporan keuangan minimum yang di syaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku.

Reformasi keuangan dan otonomi daerah telah merubah iklim pelaksanaan pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia kini dituntut terus-menerus untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) baik dari level atas (pemerintah pusat) sampai dengan level terbawah (pemerintahan daerah). Sebagai wujud pelaksanaan *good governance*, pemerintah terus

melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam segala hal, termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Usaha pengelolaan keuangan negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah bukan hanya sebatas laporan keuangan yang di sampaikan dan bukan hanya kepada pemerintah. Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan kemudian badan pemeriksa keuangan (BPK) mengaudit dan menyampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Pertanggungjawaban pelaksanaan perintah daerah sebenarnya tidak hanya diberikan kepada DPRD sebagai wakil rakyat tetapi juga masyarakat secara luas. Informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan pemda seharusnya di sampaikan kepada publik melalui media –media elektronik maupun cetak sehingga masyarakat membutuhkan akses untuk dapat melihat informasi-informasi tersebut dengan mudah dan cepat, salah satunya melalui *website*.

Website pemerintah daerah digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dana pemerintah daerah kepada publik. Riset di beberapa negara menunjukkan salah satu bentuk tranparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di internet (Laswad et.al,2005). Hampir semua pemda di Indonesia memiliki *website* dengan kualitas dan peranan yang berbeda. Berbagai informasi disajikan dalam *website* pemda , ada yang sekedar memberikan informasi umum tentang daerah tersebut , namun ada juga yang telah memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan dan sarana berkomunikasi secara interaktif dengan warganya.

Pentingnya penelitian ini di lakukan untuk mengetahui apakah pemda semalang raya memiliki *website* resmi yang mengungkapkan informasi laporan keuangan di *website* pemda, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak pihak yang mengakses *website* tersebut, karna tidak semua pemda memiliki *website* resmi yang mengungkapkan kesukarelaan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Penelitian ini mengidentifikasi tingkat karakteristik pemda yang diukur dengan (ukuran pemda , tingkat kekayaan daerah, dan jumlah penduduk).

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut kamus bahasa Indonesia (2006), karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhusuan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah pemerintah daerah, dan membedakannya dengan pemerintah daerah lain. mutu dan luas pengungkapan laporan keuangan masing – masing berbeda. Perbedaan ini dapat terjadi karena karakteristik, kebijakan, budaya, filosofi manajemen masing-masing entitas juga berbeda (Wardani,2009)

Karakteristik pemerintah pemda dalam penelitian ini mengambil tiga komponen yaitu ukuran daerah, kekayaan daerah dan jumlah satuan kerja perangkat daerah.

Ukuran Daerah

Ukuran pemerintah menunjukkan besar kecilnya pemerintah. Sesuai dengan pengukuran dalam penelitian laswad dkk (2005), ukuran pemerintah dalam penelitian ini di nilai dari aset. Dengan demikian, ukuran pemerintah menggambarkan besar kecilnya pemerintah yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Ukuran pemerintah menunjukkan seberapa besar suatu pemerintahan tersebut. Pemerintah besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada pemerintah kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas,2011).

Kekayaan Pemerintah

Kekayaan pemerintah menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut (Sinaga 2011). Kekayan Pemerintah diprosikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kamandirian daerah (Santosa dan Rahayu, 2005). Sumber PAD Yang utama adalah pajak dan retribusi daerah uang berasal dari masyarakat masing-masing daerah.

Kekayaan pemerintah yang tinggi merupakan indikator kesuksesan suatu pemerintah dalam mengelola potensi potensi dan sumber daya yang dimilikinya,

serta kesuksesan dalam hal mengelola keuangan. Pemerintah sebaiknya menunjukkan kekayaan daerahnya guna meraih simpati dari masyarakat yaitu dengan melaporkan keuangan lewat internet (Laswad *et al.* 2005).

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan sejumlah orang yang secara sah tinggal dalam suatu daerah atau negara, serta mentaati ketentuan-ketentuan dari suatu daerah atau negara dimana mereka tinggal. Besarnya PAD dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat (Simanjuntak, 2001). Sesuai dengan *StakeholderTheory*, penduduk merupakan salah satu *Stakeholder* terpenting Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi juga semakin besar. Besarnya penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik disetiap daerah kepada masyarakat lebih luas. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar tuntutan pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk pengungkapan LKPD terhadap masyarakat, mengingat fungsi pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakat

Tingkat Pengungkapan

Pengungkapan didefinisikan sebagai penyedia sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal (Hedriksen, 1997;203). Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pengungkapan suatu informasi ; (1) untuk siapa suatu informasi harus di ungkapkan ? (2) apa tujuan informasi tersebut ? (3) berapa banyak informasi yang harus diungkapkan ?

Penyajian pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan perusahaan sangat penting dan dapat di sajikan secara wajib dan sukarela, secara wajib memaksa pemda untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) yang oleh pemda mungkin ingin disembunyikan sedangkan yang sukarela dilakukan dalam rangka untuk mendorong perusahaan lain untuk membuat *disclosure* yang serupa (Mahsuni, 2002)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama diluar instansi pemerintah dengan maksud mempertanggungjawabkan kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi program dan aktivitas yang telah dilakukan (Wahyundaru, 2001; Cohen dan Kaimenakis, 2008). Tujuan laporan keuangan untuk lembaga pemerintah atau lembaga non profit adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk memonitor keefektifan manajemen dalam mengelola sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi (Jones, 1992). Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada seluruh kelompok pengguna (Kasijan, 2009)

Website Pemerintah Daerah

Website merupakan salah satu bentuk layanan yang disediakan oleh pemda untuk publikasi informasi kepada masyarakat lebih luas dengan bantuan internet. Layanan dengan bantuan internet dianggap potensial untuk dikembangkan karena minat masyarakat dalam menggunakan internet dari tahun ke tahun meningkat. Website sebagai inovasi media pelayanan publik telah berdaya guna dalam meningkatkan kuantitatif dan kualitatif pelayanan publik. Bentuk daya guna tersebut pada umumnya masih sebagai media penyampaian informasi publik interaktif dan belum berhasil menjadi sebuah media transaksi pelayanan publik.

Pengembangan hipotesis

Ukuran daerah

Ukuran pemerintah menunjukkan besar kecilnya pemerintah. Sesuai dengan pengukuran dalam penelitian laswad dkk (2005), ukuran pemerintah dalam penelitian ini di nilai dari aset. Dengan demikian, ukuran pemerintah menggambarkan besar kecilnya pemerintah yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Ukuran pemerintah menunjukkan seberapa besar suatu pemerintahan tersebut

H₁ = Ukuran pemda berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di website pemda.

Kekayaan daerah

Kekayaan pemerintah menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut (Sinaga 2011). Kekayaan Pemerintah diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kamandirian daerah (Santosa dan Rahayu, 2005). Sumber PAD Yang utama adalah pajak dan retribusi daerah uang berasal dari masyarakat masing-masing daerah.

H₂ = Tingkat kekayaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di *website* pemda.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan sejumlah orang yang secara sah tinggal dalam suatu daerah atau negara, serta mentaati ketentuan-ketentuan dari suatu daerah atau negara dimana mereka tinggal. Besarnya PAD dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat (Simanjuntak, 2001). Sesuai dengan *StakeholderTheory*, Besarnya penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik disetiap daerah kepada masyarakat lebih luas.

H₃ = Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di *website* pemda.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3 Variabel Penelitian

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah (karakteristik pemda yang meliputi ukuran pemda, kekayaan daerah dan kekayaan daerah).

Variabel dependent bisa disebut variabel terikat. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent adalah (pengungkapan laporan keuangan pemda di website pemda malang).

Populasi

Sehingga populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemda Di Malang Raya yang memiliki *website* resmi.

Sampel

Adapun kriteria-kriteria sampel yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

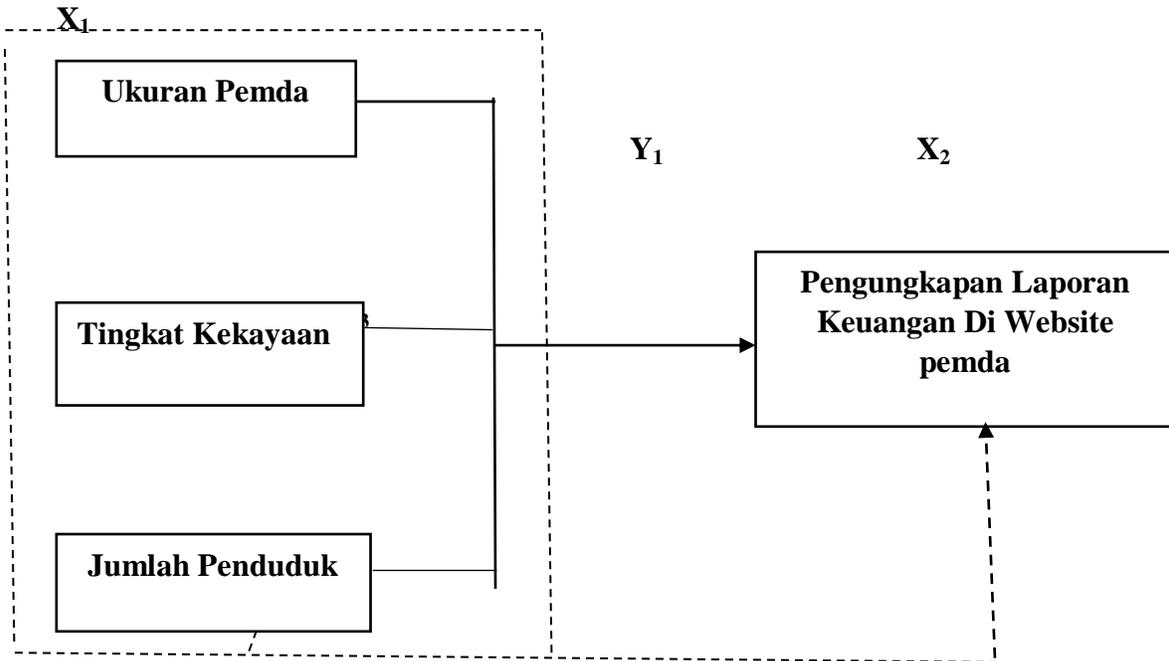
1. Pemda yang ada di malang raya Pemkab/Pemkot.
2. Pemda yang memiliki website resmi.
3. Pemda Di Malang Raya yang Melaporkan LKPD secara sukarela, Lengkap, dan Transparan.

Metode Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Model Penelitian

Kerangka konseptual



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Dependen

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tahun 2013	2	0.7765	0.7849	0.7807	0.0060
Tahun 2014	2	0.8416	0.8506	0.8461	0.0064
Tahun 2015	2	0.8947	0.9016	0.8981	0.0049
Tahun 2013-2015	6	0.7765	0.9016	0.8416	0.0528

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Independen

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Size (Ukuran Pemda)	6	2.9388	2.9573	2.9478	0.0747
Wealth (Tingkat Kekayaan)	6	1.0794	2.4393	0.1701	0.0554
Jumlah Penduduk	6	5.9447	6.5432	6.3086	0.2669

Hipotesis 1: Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.

Variabel X1 Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*) dalam tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,93 atau lebih kecil dari $\alpha=10\%$, dengan koefisien-t = 3,054 yang berarti H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (*Size*) berpengaruh terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan daerah secara signifikan. Hasil ini menolak penelitian Syafitri (2012) yang menyatakan ukuran pemerintah daerah memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah dan sejalan dengan penelitian Sumarjo (2010) yang menyatakan semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil yang menunjukkan hubungan signifikan ini dikarenakan aset yang dimiliki Pemerintah Daerah biasanya berjumlah sangat besar, hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan transparansi terhadap aset daerah kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi laporan keuangan kepada masyarakat, hal ini akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah lebih baik.

Hipotesis 2: Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.

Berdasarkan hasil pengujian regresi tabel 4.15, dapat dilihat bahwa kekayaan Pemerintah Daerah memiliki koefisien positif 2,100 dengan signifikansi 0,071 atau lebih kecil dari $\alpha = 10\%$, yang berarti H2 dapat diterima. Hal ini berarti variabel kekayaan Pemerintah Daerah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Semakin tinggi nilai kekayaan pemerintah, maka semakin memberikan tekanan terhadap pemerintah untuk mengungkapkan laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Liestiani (2008) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Kekayaan pemerintah daerah dapat dinilai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana PAD sendiri bersumber dari sektor pajak, retribusi, dan penerimaan lain. Dimana penerimaan ini diperoleh sebagian besar dari masyarakat pada umumnya, hal inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan pelaporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Hipotesis 3: Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD.

Variabel Jumlah Penduduk dalam hasil pengujian diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,950 atau lebih besar dari $\alpha = 10\%$, dan koefisien-t sebesar 0,071, artinya H3 dalam penelitian

ini ditolak. Hal ini berarti variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah. Sehingga hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2016) yang menyatakan bahwa, berdasarkan hasil pengujian jumlah penduduk yang diukur dengan logaritma variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah.

Jumlah Penduduk menunjukkan jumlah masyarakat yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar anggaran yang harus dikeluarkan. Dengan adanya anggaran besar yang ditujukan untuk masyarakat, namun dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka pemerintah tidak terdorong untuk melakukan pelaporan keuangan publik. Selain itu, sikap konservatif Pemerintah Daerah terhadap pihak-pihak eksternal, yang ditakutkan akan menyalahgunakan laporan keuangan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga, meskipun Jumlah Penduduk semakin besar, hal ini tidak menyebabkan pemerintah transparan terhadap masyarakat secara umum.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis apakah pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Semelang Raya pada tahun 2013 s/d 2015 di *Website*. Berdasarkan hasil uji deskriptif ditemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Semelang Raya selama tahun 2013 s/d 2015 adalah sebesar 84,1%. Berdasarkan pengujian rata-rata Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Semelang Raya selalu mengalami peningkatan, sejak tahun 2013 ke tahun 2014 meningkat sebesar 6,6% menjadi 84,6%, dan sejak tahun 2013 ke tahun 2015 meningkat sebesar 5,2% menjadi 89,8%. Adanya peningkatan dalam pengungkapan LKPD menunjukkan bahwa pemerintah selalu ingin mewujudkan sistem pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel, serta selalu mewujudkan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini menguji 3 (tiga) variabel independen yang diuji terhadap variabel dependen, yaitu Ukuran Pemda (*Size*), Kekayaan Pemda (*Wealth*), dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Semalang Raya di *Website*. Hasil yang diperoleh atas pengujian ketiga variabel tersebut tidak ada yang berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Semalang Raya di *Website*.

Berikut ini merupakan kesimpulan atas hasil pengujian pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Semalang Raya tahun 2013-2015:

1. Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*) berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD di *Website*. Dimana semakin besar aset Pemerintah Daerah, namun tidak diiringi dengan kemampuan yang memadai mengenai standar yang berlaku dan pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatannya, maka akan menyebabkan Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengungkapkannya di *website*.
2. Kekayaan Pemerintah Daerah (*Wealth*) berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD di *Website*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kekayaan pemerintah daerah, namun pegawai pemerintahan tidak memiliki kemampuan dan *background* pendidikan yang sesuai maka akan menyebabkan Pemda tidak melaporkan keuangannya di *website*.
3. Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD di *Website*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk yang relatif besar pemerintah tidak serta merta mengungkapkan seluruh laporan keuangan di *Website* pemerintah. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat secara mayoritas terhadap media *Website* pemerintah, selain itu hal ini juga diindikasikan sebagai sikap pemerintah daerah yang konservatif terhadap penyalahgunaan laporan keuangan untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan untuk penelitian berikutnya. Berikut adalah keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik pemerintah, yaitu ukuran pemda (*size*), kekayaan pemerintah (*wealth*), dan jumlah penduduk.

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan populasi dilingkungan Kabupaten/Kota Semalang Raya.

Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah agar mempertimbangkan beberapa saran berikut, guna perbaikan dalam penelitian berikutnya:

1. Untuk penelitian berikutnya diharapkan supaya tidak hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik pemerintah daerah. Terdapat beberapa karakteristik lain yang juga relevan untuk digunakan dalam penelitian berikutnya mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu ukuran legislatif, jumlah satuan kerja perangkat daerah, umur administrative pemerintah daerah, spesialisasi pekerjaan, jumlah pegawai publik, pembiayaan utang, dan lain-lain. Hal ini diharapkan supaya dalam penelitian berikutnya menjadi lebih bervariasi dan dapat menggambarkan keadaan pemerintah daerah secara tepat.
2. Untuk penelitian berikutnya diharapkan supaya tidak hanya menggunakan jumlah sampel yang sedikit atau hanya dilingkungan Kabupaten dan Kota saja. Melainkan juga dapat menggunakan sampel ditingkat provinsi atau diseluruh Indonesia, agar hasil yang diperoleh juga lebih luas dan tidak monoton.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, fajar, 2007. Laporan keuangan daerah perlu akuntabilitas. *Harian Bisnis Indonesia* 19 November 2007. Diakses melalui www.bpk.go.id.
- Bastian, I. 2006. *Aakuntansi Sektor Publik*, jakarta : Erlangga.
- Cohen, S and N Kaimenakis. 2008. *An Empirical Investigation of Greek Municiplities Quality of Financial Reporting. Working paper series.*
dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi 15, Balikpapan, 20-7 eptember 2012.
- Escobar, T., & Bonson, E. (2005). A survey on voluntary disclosure on the internet: Empirical evidence from European Union companies. *The International Journal of Digital Accounting Research Vol 2*, 27-51.
- Fitria, A.G. 2006. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ghozali, Iman. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegor, 2006.
- Ghozali. I dan Ratnono, D 2008. *Akuntansi keuangan pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD). Sesuai Peraturan Perundang- Undangan Terbaru*. Semarang Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriksen, El don S. Teori akuntansi, diterjemahkan oleh nugroho W, 1997. Jilid II, Edisi Keempat, Penerbit erlangga, jakarta.
- Ingram, R. W 1984. Economic incentives and the choice of state government accounting practices. *Journal of Accounting Research* 22 (1): 126-144.
- Jones, Rowan 1992. *The Development of Copnceptual Frameworks of Accounting for The Public Sector*. *Journal Financial Accounting and Management*. Vol 8:249-264Kasijan.
- Kasijan, 2009. *Perbedaan Persepsi antar Stakeholdes terhadap Dukungan Pejabat dalam Penerapan SAP, Akuntabilitas Keuangan dan transparansi pada Laporan Keuangan*

Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Kulon Progo). Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy Vol 24*, 101-121.

Liestiani, A. (2008). Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006. *Skripsi Sarjana FEUI*.

Mahsuni dan Abdul Wahid 2002. Manfaat Disclosure dalam laporan keuangan, Diksi VOIXVI/ No 2 FE unisma malang.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished Ph.D Dissertation*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.

Pemerintah Daerah. Skripsi. FE UNS. Surakarta.

Pengungkapan Sukarela Pada Website Pemda Tahun 2010. Paper

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 dan 59, Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2007. Depdagri RI

Peraturan Pemerintah No.24. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 3 Tahun 2007. *Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008. *Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007. (2007). *Tatacara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.*
- Perez, C. C., Hernandez, A. M., & Bolivar, M. P. (2005). Citizen access to on-line governmental financial information: Practices in the European Union Countries. *Government Information Quarterly Vol 22, 258-276.*
- Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Puspita, Rora., Dwi Martani. 2012. *Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat*
- Sekaran, Uma. 2006. *Reseach Methods for Business*. Four Edition. John Wiley and Sons Inc.
- Sugiyono, 2008.” Metode penelitian kauntitatif, kualitatif dan R&D” bandung penerbit alfabeta.
- Suhardjanto dan Yulianingtyas, R.2011.*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan PengungkapanWajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*Universitas Sebelas Maret.
- Syafitri, Febriyai. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Derah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.* FEUI
- Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan*
- Undang-Undang No 17 tahun 2003 *tentang Pengeloaan Keuangan Negara*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahandaerah.
- Wahyundaru, Sri 2001. *Akuntansi Sektor Publik dalam Otonomi Daerah*, Diakses melalui : suaramerde.com 6 mei 2010.
- West, D. M. (2005). *Digital government, technology, and public sector performance*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- Yulianingtyas, Rena R. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah*